

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 44 TAHUN 2019  
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**Mukhlas Wilda Wardana  
NIM. 160802027**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mukhlas Wilda Wardana  
NIM : 160802027  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal lahir : Sigli, 03 November 1998  
Alamat : Perumnas Lhok Keutapang Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2020  
Yang Menyatakan



Mukhlas Wilda Wardana  
NIM. 160802027

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 44 TAHUN 2019  
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**Muklas Wilda Wardana**

NIM. 160802027

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Dismunaqasyahi oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Mahmuddin S.Ag., M.Si.  
NIP. 197210201997031002

Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP. 198411252019032012

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 44 TAHUN 2019  
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(Studi Komparatif Di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020  
07 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si  
NIP: 197210201997031002

  
Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP: 198411252019032012

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Dahlawi, M.Si.  
NIP: 196201011985031019

  
Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP: 199002282018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

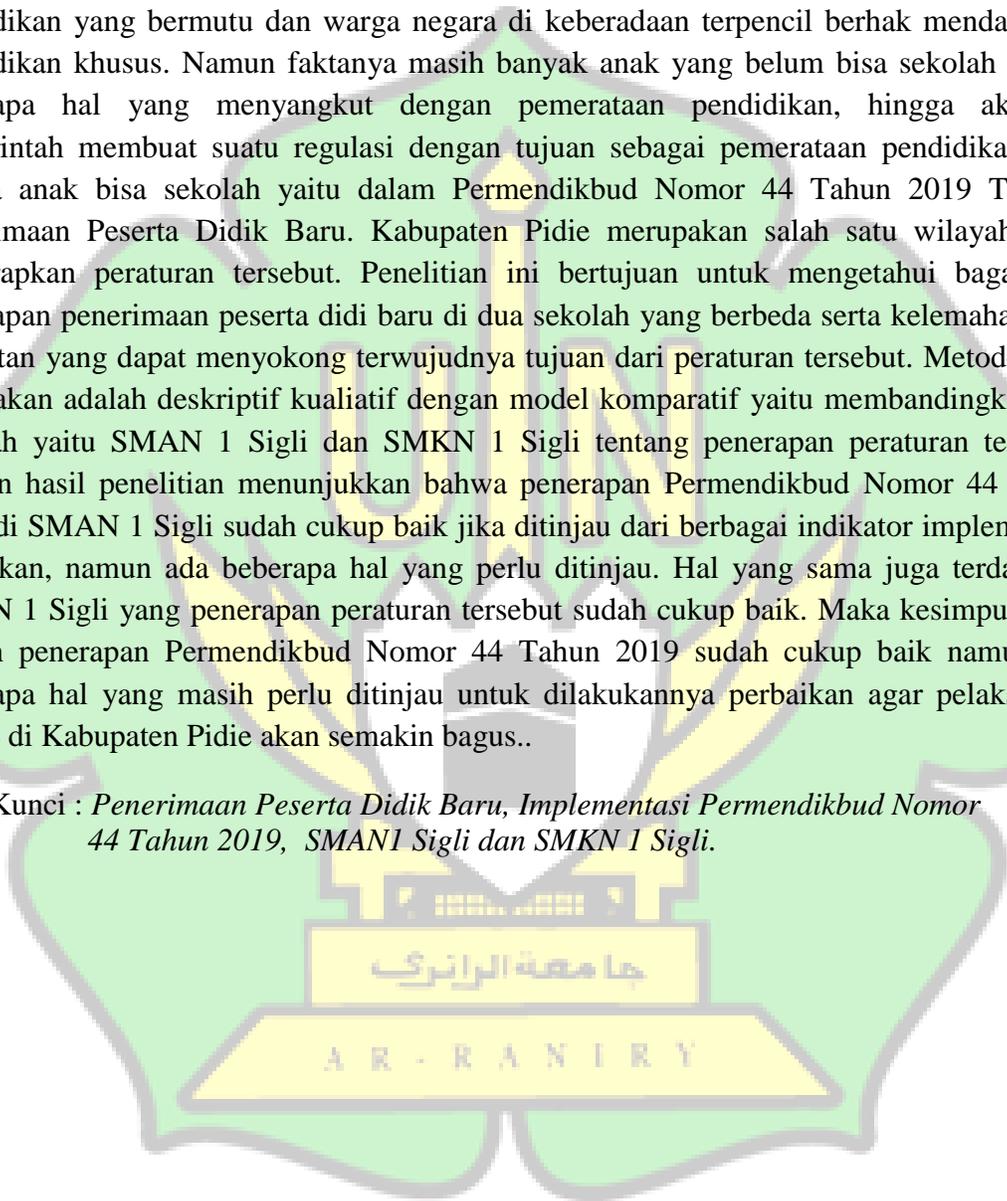


  
Dr. Errita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP: 197307232000032002

## ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan warga negara di keberadaan terpencil berhak mendapatkan pendidikan khusus. Namun faktanya masih banyak anak yang belum bisa sekolah karena beberapa hal yang menyangkut dengan pemerataan pendidikan, hingga akhirnya pemerintah membuat suatu regulasi dengan tujuan sebagai pemerataan pendidikan agar semua anak bisa sekolah yaitu dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah yang menerapkan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan penerimaan peserta didi baru di dua sekolah yang berbeda serta kelemahan juga kekuatan yang dapat menyokong terwujudnya tujuan dari peraturan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model komparatif yaitu membandingkan dua sekolah yaitu SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli tentang penerapan peraturan tersebut, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Sigli sudah cukup baik jika ditinjau dari berbagai indikator implementasi kebijakan, namun ada beberapa hal yang perlu ditinjau. Hal yang sama juga terdapat di SMKN 1 Sigli yang penerapan peraturan tersebut sudah cukup baik. Maka kesimpulannya adalah penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang masih perlu ditinjau untuk dilakukannya perbaikan agar pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pidie akan semakin bagus..

Kata Kunci : *Penerimaan Peserta Didik Baru, Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, SMAN1 Sigli dan SMKN 1 Sigli.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli Kabupaten Pidie)”. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli Kabupaten Pidie)” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai, Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada orang-orang terhebat serta teristimewa dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, S.IP. M. Soc. Sc Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada bapak: Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si. dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-

ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada Ayah dan Ibu yang telah senantiasa selalu mendokan penulis untuk dapat penyelesaian skripsi.
9. Kepada teman dan kerabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 tanpa kecuali.
10. Kepada Pihak Sekolah SMAN 1 Sigli yang telah bersedia memberikan informasi, waktu dan juga tempat untuk penulis melakukan sebuah penelitian.
11. Kepada Pihak Sekolah SMKN 1 Sigli yang telah bersedia memberikan informasi, waktu dan juga tempat untuk penulis melakukan sebuah penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. ■■■■

Banda Aceh, 28 Juli 2020

Penulis,



Mukhlas Wilda Wardana  
NIM. 160802027

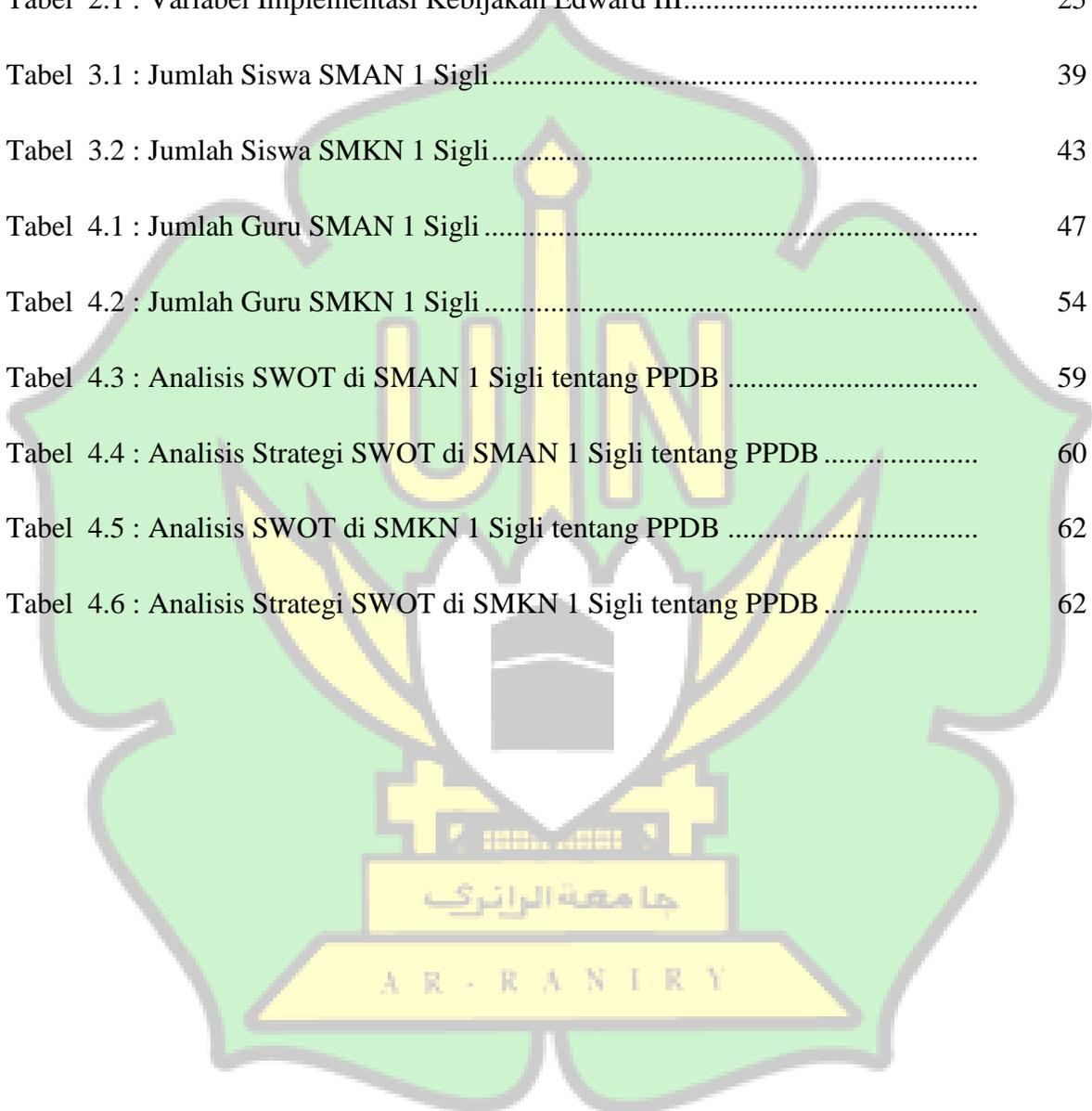
## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iiix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
1.6. Penjelasan Istilah .....	6
1.7. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	14
2.2. Landasan Teori .....	16
2.2.1 Implementasi.....	16
2.2.2 Kebijakan .....	16
2.2.3 Implementasi Kebijakan .....	20
2.2.3.1 Model Implementasi Kebijakan.....	21

2.2.4 Analisis SWOT .....	31
2.2.6 Tinjauan Tentang Penerima Peserta Didik Baru .....	33
2.3. Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
3.1 SMAN 1 Sigli .....	37
3.2 SMKN 1 Sigli .....	42
<b>BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB .....	45
4.1.1 Implementasi PPDB di SMAN 1 Sigli .....	45
4.1.2 Implementasi PPDB di SMKN 1 Sigli .....	51
4.1.3 Perbedaan Implementasi PPDB di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli .....	57
4.2 Analisis SWOT .....	59
4.2.1 Analisis SWOT di SMAN 1 Sigli.....	59
4.2.2 Analisis SWOT di SMKN 1 Sigli.....	61
4.3 Temuan Masalah.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	65
5.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	

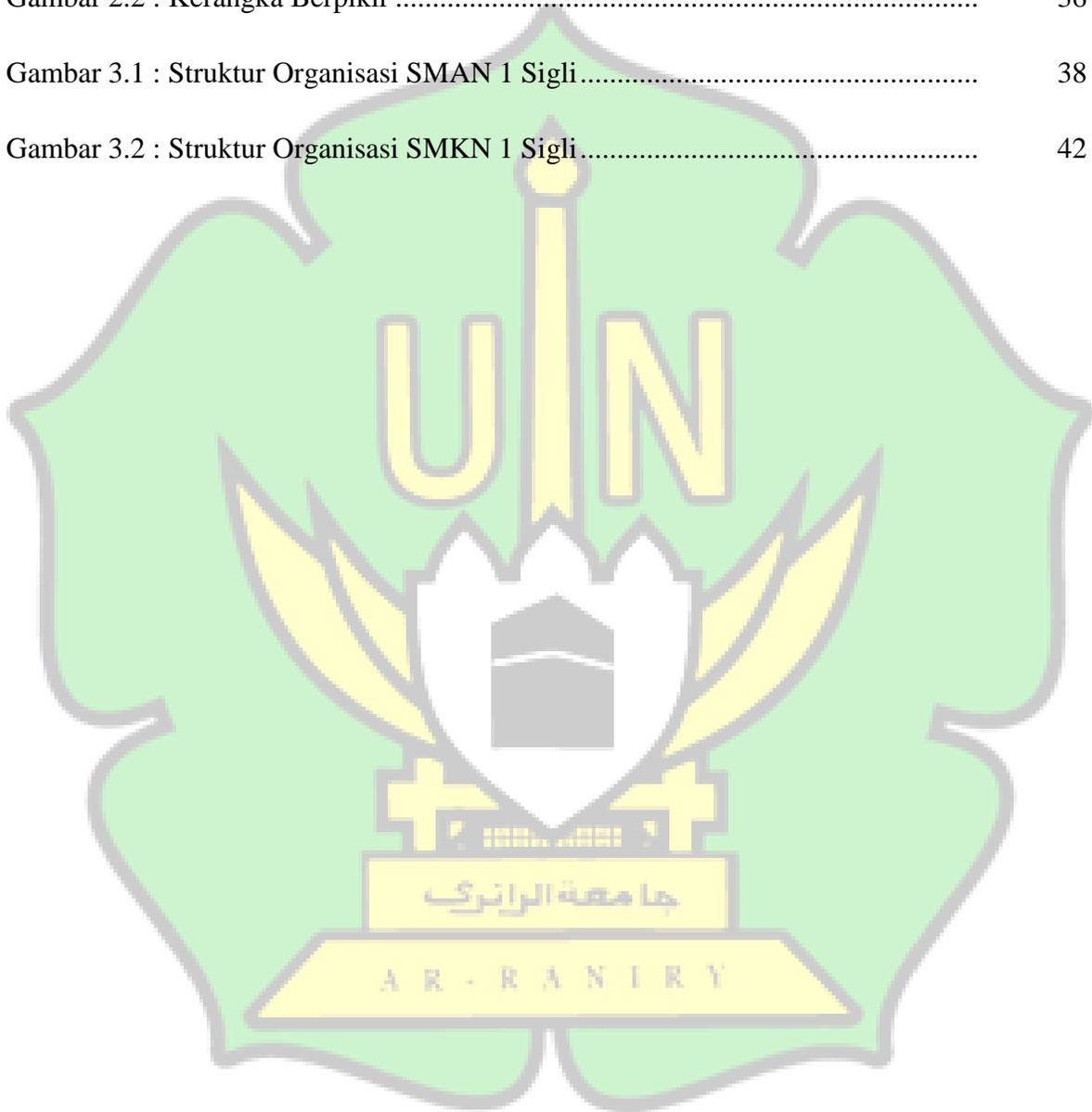
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Infroman Penelitian .....	9
Tabel 2.1 : Variabel Implementasi Kebijakan Edward III.....	25
Tabel 3.1 : Jumlah Siswa SMAN 1 Sigli.....	39
Tabel 3.2 : Jumlah Siswa SMKN 1 Sigli.....	43
Tabel 4.1 : Jumlah Guru SMAN 1 Sigli .....	47
Tabel 4.2 : Jumlah Guru SMKN 1 Sigli .....	54
Tabel 4.3 : Analisis SWOT di SMAN 1 Sigli tentang PPDB .....	59
Tabel 4.4 : Analisis Strategi SWOT di SMAN 1 Sigli tentang PPDB .....	60
Tabel 4.5 : Analisis SWOT di SMKN 1 Sigli tentang PPDB .....	62
Tabel 4.6 : Analisis Strategi SWOT di SMKN 1 Sigli tentang PPDB .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Analisis Data Model Interaktif .....	13
Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir .....	36
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi SMAN 1 Sigli.....	38
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi SMKN 1 Sigli.....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh

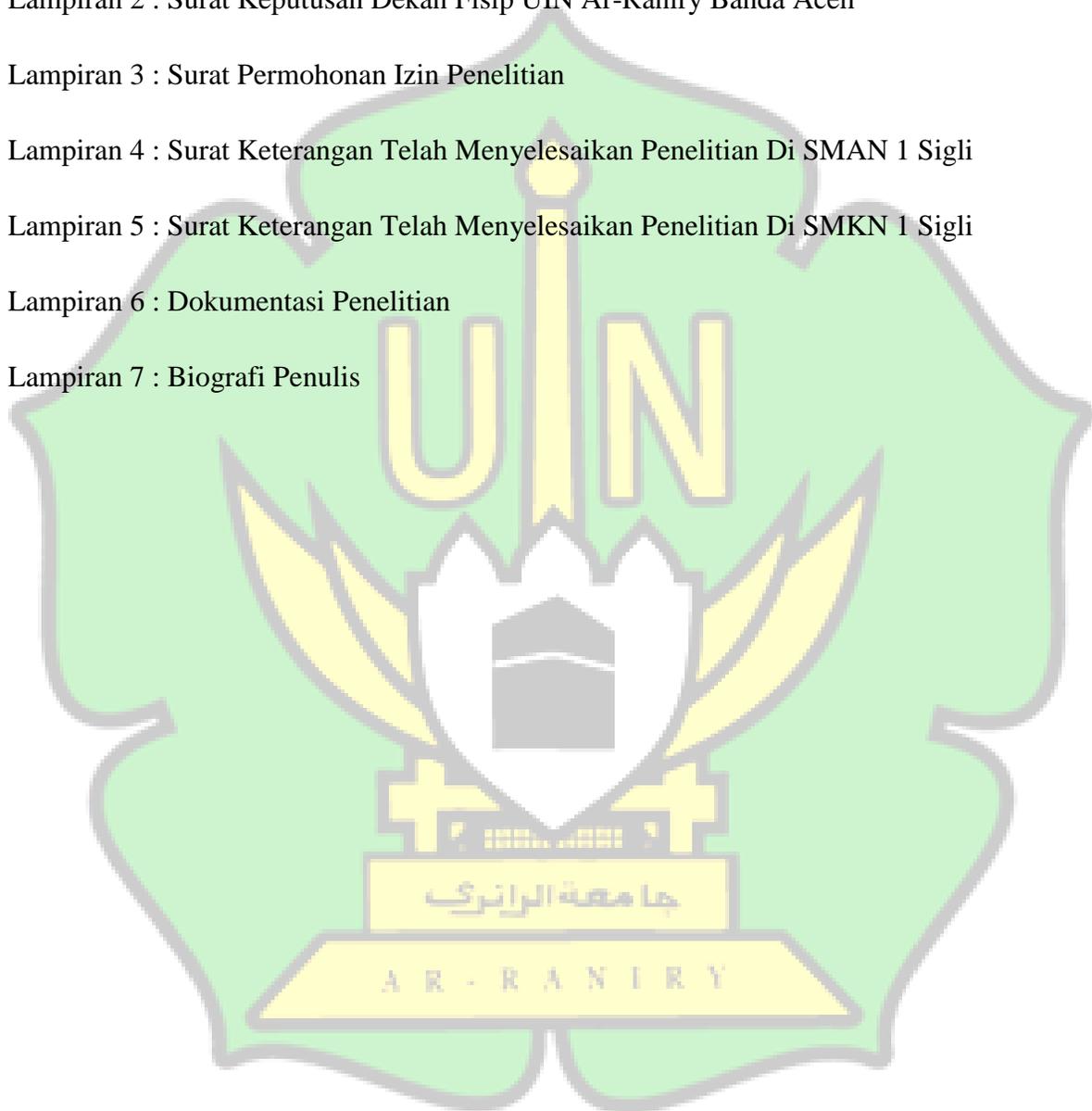
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian Di SMAN 1 Sigli

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian Di SMKN 1 Sigli

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 : Biografi Penulis



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sumber kemajuan suatu bangsa, melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia negara dapat ditingkatkan. Karena sumber daya manusia adalah aset utama dalam suatu pembangunan negara, tak terkecuali negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pasal 5 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.<sup>2</sup> Artinya pendidikan di Indonesia harus merata dan setiap warga negara mempunyai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 5.

kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan potensi diri serta memiliki wawasan yang luas.

Namun faktanya jumlah anak putus sekolah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 4,5 juta menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ada berbagai alasan yang membuat jumlah anak putus sekolah di Indonesia meningkat, namun penyebab utamanya adalah kemiskinan dan sebaran sekolah di tiap daerah sehingga membuat banyak anak harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa bersekolah.<sup>3</sup> Upaya pemerintah dalam menjawab persoalan pemerataan pendidikan salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pelaksanaan serta pengawasan, sanksi dalam penerimaan peserta didik baru serta mengatur mengenai sistem zonasi.

Permendikbud No 44 Tahun 2019. Peraturan ini dibuat atas dasar untuk pemerataan pendidikan diseluruh daerah di Indonesia dan juga sebagai perwujudan dari salah satu tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan lain dari peraturan ini juga untuk menghapus pandangan masyarakat tentang sekolah favorit. Peraturan ini telah berjalan selama 2 tahun sejak disahkan dan diberlakukan secara nasional pada tahun 2017. Kabupaten Pidie Provinsi Aceh merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan peraturan tersebut, dan SMAN 1 Sigli menjadi pionir dalam terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru

---

<sup>3</sup> <https://www.tempo.co/abs/4460/partisipasi-pendidikan-naik-tapi-jutaan-anak-indonesia-masih-putus-sekolah> (diakses pada 22-12-2019 10:05)

tahun 2019 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, karena merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Sigli.

Berdasarkan observasi awal pada bulan Mei 2020 dengan mewawancarai beberapa siswa yang bersekolah di SMAN 1 Sigli tentang PPDB tahun 2019. Ditemukan bahwa SMAN 1 Sigli mulai menerapkan PPDB terbaru pada Tahun Ajaran 2020-2021. Penerapan ini sesuai dengan bulan disahkannya peraturan tersebut yaitu pada bulan 12 tahun 2019, sebelumnya PPDB di SMAN 1 Sigli masih menggunakan penerapan yang Permendikbud Nomor 14 tahun 2018.. Penulis juga melakukan observasi dan wawancara singkat dengan siswa SMKN 1 Sigli terkait dengan PPDB terbaru.. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa SMKN 1 Sigli juga menerapkan PPDB tahun 2019 sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Penulis juga melakukan observasi terhadap masyarakat tentang adanya sistem PPDB terbaru ini. Sebagian masyarakat masih belum faham bahkan tidak mengetahui tentang sistem PPDB baru yang sedang berjalan, tentu saja ketidak fahaman orang tua akan peraturan tersebut dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan sosialisasi tentang peraturan tersebut secara intensif agar masyarakat paham tentang PPDB dan mengetahui tujuan utama diberlakukannya peraturan tersebut. Maka oleh karena itu proses pengimplementasian Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dilakukan sesuai dengan dengan baik dan benar agar tercapainya tujuan yang diinginkan serta menjawab segala permasalahan pendidikan yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan gambaran bahwa penerapan PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 telah dilaksanakan di sekolah menengah atas dan sederajat di Kabupaten Pidie. Dari gambaran tersebut penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan implementasi PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 dengan membandingkan dua objek penelitian yang berbeda namun melakukan penerapan peraturan yang sama. Penulis ingin menemukan apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2019 di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli serta melihat apa saja faktor pengambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan di kedua sekolah tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul : **“IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 44 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli )”**.

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penerapan PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sudah dijalankan di sekolah yang ada di kabupaten pidie. Akan tetapi penulis belum mengetahui pasti apakah pelaksanaan PPDB tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu penulis merasa bahwa perlu untuk dilakukannya penelitian terhadap implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, apakah pihak sekolah sudah menjalankan PPDB sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam aturan tersebut dan apa saja kekuatan dan kelemahan pihak sekolah dalam menjalankan PPDB tersebut.

### 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan dalam pelaksanaan PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli ?
2. Apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam mengimplementasikan PPDB di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan yang telah disimpulkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perbedaan implementasi PPDB Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli.
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan dalam implementasi PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 Tentang PPDB di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi pembaca untuk digunakan sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Akademis

Secara akademis manfaat ini berguna untuk memberikan pengetahuan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi dan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan pihak lain yang berkaitan dalam perumusan kebijakan khususnya dalam pengimplementasian sistem penerimaan peserta didik baru.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Menambah dan memperluas wawasan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang diangkat, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga untuk mengapresiasikan ilmu yang telah dipelajari selama dalam perkuliahan.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Adapun dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam penulisan, berikut penulis akan memberikan penjelasannya :

1. Standar Operasional : Suatu rancangan yang berkaitan dengan prosedur  
Prosedur yang dilakukan secara kronologi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
2. Purposive Sampling : Teknik sampling data dengan menentukan  
ciri-ciri khusus sesuai tujuan penelitian
3. Public Policy : Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama  
yang harus ditaati dan bersifat mengikat pada seluruh warga
4. Top Down : Suatu pola penyampaian informasi melalui rantai

komunikasi dari atasan ke bawahan

5. Implementability : Suatu ukuran yang digunakan oleh pelaksanaan program dalam mengukur kemampuan dalam pelaksanaan
6. Content of Policy : Isi kebijakan yang mencakup tujuan dan keinginan, definisi masalah, dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan
7. Context of Policy : Konteks kebijakan yang mencakup tentang karakteristik pelaksana kebijakan seperti kekuatan lembaga, kepentingan lembaga dan tingkat kepatuhan lembaga yang terkait.

## **1.7 METODE PENELITIAN**

### **1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif melalui studi komparatif dengan penelitian kualitatif yang akan memberikan gambaran tentang Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli Kabupaten Pidie.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pidie. Hal ini di dasarkan karena Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ini mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pidie. Lokasi yang akan diteliti adalah SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli.

### **1.7.3 Jenis dan Sumber Data**

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Secara aplikatif data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Pada penelitian ini data primer adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Sigli, Bidang Kesiswaan SMAN 1 Sigli, Kepala Sekolah SMKN 1 Sigli dan Bidang Kesiswaan SMKN 1 Sigli Kabupaten Pidie, calon wali murid SMAN 1 Sigli, dan calon wali murid SMKN 1 Sigli.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data ini dapat berupa sumber tertulis di luar kata dan tindakan, dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder adalah data penunjang yang berasal dari berbagai literatur, foto atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa undang-undang atau peraturan, surat-surat keputusan, arsip-arsip, laporan kegiatan, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini sumber data sekunder adalah jurnal, skripsi, dan media massa.

### 1.7.4 Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan karena subjek dianggap memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Dikarenakan ini merupakan penelitian kualitatif, maka sampel diambil tidak berdasarkan keterwakilan. Adapun informan yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah antara lain :

Tabel I.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Sekolah SMAN 1 Sigli	1
2	Kepala Sekolah SMKN 1 Sigli	1
3	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 1 Sigli	1
4	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Sigli	1
5	Calon Wali Murid SMAN 1 Sigli	1
6	Calon Wali Murid SMKN 1 Sigli	1

### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Observasi

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku. Observasi dilakukan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. dilakukan secara non-partisipatif yaitu peneliti tidak terlibat dalam sistem yang sedang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang biasanya menggunakan pedoman wawancara dengan maksud untuk mendapatkan berbagai informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan PPDB.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peratran, dan kebijakan. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian dari observasi dan wawancara agar lebih kredibel.

### 1.7.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

### 1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang ada pada lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Pada tahapan ini, penulis memilih mana data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian implementasi PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Kemudian penulis memilah dan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan peraturan tersebut.

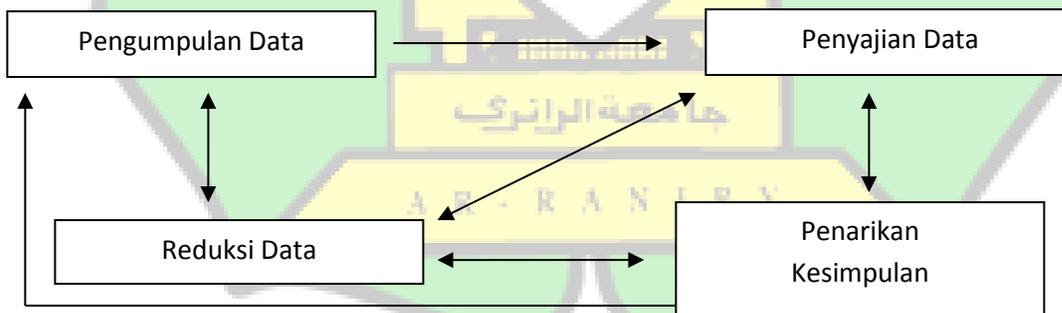
### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi terusun yang berguna untuk memudahkan penulis memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara untuk diadakan suatu kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan proses implementasi PPDB di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli Kabupaten Pidie, yang terdiri dari pelaksanaan program dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut. Berikut ini adalah gambar analisis data model interaktif yang peneliti gunakan dalam menganalisis data.

Gambar 1.1 : *Analisis Data Model Interaktif*



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

1. Elsa Nida Pangaribuan dan Nunuk Hariyati, dengan judul :*“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabuoaten Gresik”* menggunakan metode kualitatif dan rancangan studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi berjalan dengan lancar namun tetap memiliki kendala, yaitu pemahaman orang tua terhadap sosialisasi PPDB sistem zonasi.<sup>4</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulisa adalah penelitian yang dilakukan oleh Elsa Nida Pangaribuan dna Nunuk Hariyati menggunakan Permendikbud Nomo 14 Tahun 2018 sedangkan penulis menggunakan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.
2. Hermin Aprilia Lestari, dengan judul *“Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017”* menggunakan metode deksriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah berjalan baik. Baik *offline* maupun *online*. Namun, terdapat permasalahan terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB.<sup>5</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia Lestari berfokus pada

---

<sup>4</sup> Elsa Nida Pangaribuan "Implemnetasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik baru Jenjang SMP Di Kabuoaten Gresik" 2018.

<sup>5</sup> Hermin Aprilia Lestari *“Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017”* 2017.

penerimaan peserta didik baru, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada jalur penerimaan zonasi.

3. Selanjutnya, Aullia Rahmawati dan Muflihatin dengan judul : “*Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri*” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pada Tahun Ajaran 2017/2018 kebijakan PPDB zonasi masih hanya untuk SMA dan SMK, sedangkan pada SMP belum ada pemberlakuan. Tetapi untuk tahun ajaran 2018/2019 kebijakan PPDB zonasi masih menjadi wacana yang akan dirumuskan melalui musyawarah dengan pihak terkait.<sup>6</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Aullia Rahmawati dan Muflihatin memfokuskan pada komunikasi yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana implementasi penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi dijalankan, serta kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaannya.

<sup>6</sup>

Aullia Rahmawati dan Muflihatin dengan judul : “*Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri*” 2018.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1 Implementasi

Grindle menyatakan, implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Grindle juga menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa implementasi memahami realita atas suatu kebijakan atau peraturan yang telah dibuat atau dijalankan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul setelah dijalkannya suatu kebijakan yang kompleks mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk menjalankan perencanaan yang telah dibuat agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

### 2.2.2 Kebijakan

Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan

<sup>7</sup> Haedar Akib & Antonius Tarigan Jurnal "Artikulasi konsep implementasi kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, hal 2.

<sup>8</sup> Solihin, Abd Wahab, 1997. Analisis Kebijakan I, Haji Mas Agung, Jakarta

menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Teori ini sesuai dengan pendapat James E. Anderson yang mengatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.<sup>9</sup>

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik dan dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.<sup>10</sup>

Kebijakan menurut Willian Dunn dalam Joko Santoso bahwa kebijakan sebagai suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah sosial. Dalam orientasinya lebih menekankan Bagaimana hakekat permasalahannya, makna terhadap pemecahan masalah tersebut dan hasil yang akan diharapkan dari kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah-masalah sosial.<sup>11</sup>

Abidin meyakini bahwa secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu :

- a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya :

---

<sup>9</sup> Sri Suwitri dalam Modul “*Konsep Dasar Kebijakan Publik*”

<sup>10</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2104), hal 33.

<sup>11</sup> Taufiqurakhman., 2014, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers) hal. 44.

1) Rasional, yaitu tujuan yang dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat.

Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.

2) Diinginkan (*desirable*), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.

3) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.

4) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kedaluarsa.<sup>12</sup>

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.<sup>13</sup> Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek, yakni :

- a. Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat.

<sup>12</sup> Said Zainal, Abidin, 2006, Kebijakan Publik, Edisi Revisi Cetakan Ke-3, Jakarta : Suara Bebas.

<sup>13</sup> Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung: Puspa.

Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisoir, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, hak untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan intensif atas tindakan bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.<sup>14</sup>

Wahab menyatakan tentang kebijakan publik, yakni :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang haru dilakukan dalam menghadapi suatu masalah

---

<sup>14</sup> Thoha, M. (2012). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperuan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

### **2.2.3 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah salah satu dari beberapa proses kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan diformulasikan dan siap untuk dijalankan. Implementasi menjadi salah satu elemen penting dalam mengevaluasi suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan atau sebaliknya.

Menurut Udoji, Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan publik menurut pendapat Anderson adalah esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada sasaran. Sedangkan menurut Grindle implementasi kebijakan public

---

<sup>15</sup> Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politik dan administratif.<sup>16</sup>

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses penyelenggaraan peraturan yang telah direncanakan dan ditetapkan tujuan daripada peraturan tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

### **2.2.3.1 Model Implementasi Kebijakan**

Para ahli kebijakan juga mengungkapkan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijakan yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variable yang menjadi fokus analisis. Model-model tersebut antara lain :

#### **1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Meter dan Horn menegemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja impementasi, yakni:

1. Standard dan sasaran kebijakan, dimana standard dan sasaran kebijaan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standard dan sasaran kebijakan kabur,
2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain,

<sup>16</sup> Hariyoso, S. 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Peradaban. Yogyakarta.

sehingga diperlukan dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu :
  - a) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
  - b) Kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan
  - c) Intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.<sup>17</sup>

## 2. Teori George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, studi implementasi kebijakan adalah suatu hal yang penting bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah

<sup>17</sup> Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Pendekatan ini mempunyai empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Komunikasi, setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dari sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber Daya, yaitu menunjukkan pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok

sasaran. Sedangkan sumber daya *financial* adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan atau program.

- 3) Disposisi, yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada pelaksana kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan atau program adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap dari pelaksana kebijakan kadang dapat menyebabkan masalah apabila cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan, oleh karena itu mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai dan insentif.
- 4) Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operasional Prosedur* yang dicantumkan dalam aturan kebijakan dan program. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.<sup>18</sup>

Model implementasi kebijakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan diberbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra

---

<sup>18</sup> Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Gava Media. Yogyakarta.

fenomena implementasi kebijakan publik. Aplikasi model ini dalam kajian implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Variabel Implementasi Kebijakan Edward III

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari kebijakan</li> <li>• Bagaimana sosialisasi kebijakan efektif dijalankan</li> <li>• Intensitas komunikasi</li> </ul>
Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan implementor</li> <li>• Tingkat pendidikan</li> <li>• Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan</li> <li>• Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkannya</li> <li>• Ketersediaan dana</li> <li>• Jumlah dana yang dialokasikan</li> <li>• Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi kebijakan</li> </ul>
Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakter pelaksana</li> <li>• Tingkat komitmen dan kejujuran, dapat diukur</li> </ul>

	<p>dengan tingkat konsistensi antar pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan <i>sharing</i> dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi.</li> </ul>
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan SOP</li> <li>• Struktur organisasi</li> <li>• Seberapa jauh rentang kendali antara puncak pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.</li> </ul>

*Sumber : Dwiyanto Indiahono, 2009*

## 2. Teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik ini mengungkapkan bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan dipecahkan, meliputi :
  - a. Kesukaran teknis
  - b. Keberagaman perilaku yang diatur
  - c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
  - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
2. Kemampuan kebijakan menstrukturi proses implementasi secara tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstrukturi proses implemetasi secara tepat melalui beberapa cara :

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
  - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
  - c. Ketetapan alokasi sumber dana
  - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi pelaksana
  - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
  - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
  - g. Akses formal pihak-pihak luar
3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implemetasi
    - a. Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi
    - b. Dukungan publik
    - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

- d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.<sup>19</sup>

### 3. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Grindle, pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. *Content of policy* adalah sebagai berikut :

- a. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

*Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Menurut poin ini dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Menurut *Extent of change envision* setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

<sup>19</sup> Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan keputusan harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. *Resource Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sedangkan *Context of policy* menurut Grindle adalah sebagai berikut :

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepetingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu impleentasi kebijakan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance an Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan respon pelaksana)

Pada poin ini sejauh mana kepatuhan dan respon dari peaksana menanggapi suatu kebijakan yang dijalankan.<sup>20</sup>

#### 4. Teori David L. Wmer dan Aidan R.Vining

Welmer dan Vining mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu :

1. Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bisa saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.

---

<sup>20</sup> Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Hal 154-155.

3. Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan
  - Rasa hormat anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
  - Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
  - Adanya sanksi hukum
  - Adanya kepentingan publik
  - Adanya kepentingan pribadi
  - Masalah waktu
- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
  - Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
  - Tidak adanya kepastian hukum
  - Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
  - Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.<sup>21</sup>

#### 2.2.4 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi Perusahaan. Analisis SWOT mempunyai peranan penting dalam

<sup>21</sup> Subarsono, 2006. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

kemajuan usaha yang akhir-akhir ini semakin kompetitif persaingannya dalam mencapai tujuan. arti dari SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats. Yang artinya Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Definisi analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Peluang (Opportunities)

Suatu peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan utama adalah salah satu dari peluang identifikasi dari segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan-perubahan dalam keadaan bersaing, atau peraturan, perubahan teknologi, dan hubungan pembeli dan pemasok yang diperbaiki dapat menunjukkan peluang bagi perusahaan.

2. Ancaman (Threats)

Ancaman adalah rintangan-rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan dari perusahaan. Masuknya pesaing baru, perumbuhan pasar yang lambat, daya tawar pembeli dan pemasok utama yang meningkat, perubahan teknologi, dan peraturan yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi keberhasilan suatu perusahaan.

3. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar suatu perusahaan layani atau hendak layani. Kekuatan merupakan suatu kompetensi yang berbeda

(destintive competence) yang memberi perusahaan suatu keunggulan komparatif (comparative advantage) dalam pasar. Kekuatan berkaitan dengan sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli/pemasok, dan faktor-faktor lain.

#### 4. Kelemahan (weaknesses)

Kelemahan merupakan keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan, dan kemampuan yang secara seerius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan<sup>22</sup>.

### 2.2.5 Tinjauan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dimana dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 membahas tentang Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) bagi TK, SD, SMP, dan SMA sederajat.

#### Tahap Pelaksanaan PPDB

##### Pasal 21

- 1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan e. daftar ulang.
- 2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- 3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

<sup>22</sup>

Apriandes Emel, 2013. Analisis SWOT Guna Penyusunan Rencana Induk E-Government Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.<sup>23</sup>

Dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Urutan prioritas itu adalah:

- 1) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- 2) Usia;
- 3) Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP);
- 4) Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Adapun yang menjelaskan tentang tahapan PPDB terdapat dalam pasal :

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. PPDB dapat dilakukan dengan dua cara :

- a) Pertama, pendaftaran melalui jejaring (*daring/online*), yaitu melalui laman website resmi PPDB daerah masing-masing.

<sup>23</sup>

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Pasal 21.

- b) Kedua, pendaftaran melalui luring (luar jaringan/*offline*), yaitu dengan mendaftar langsung ke sekolah.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru.<sup>24</sup>

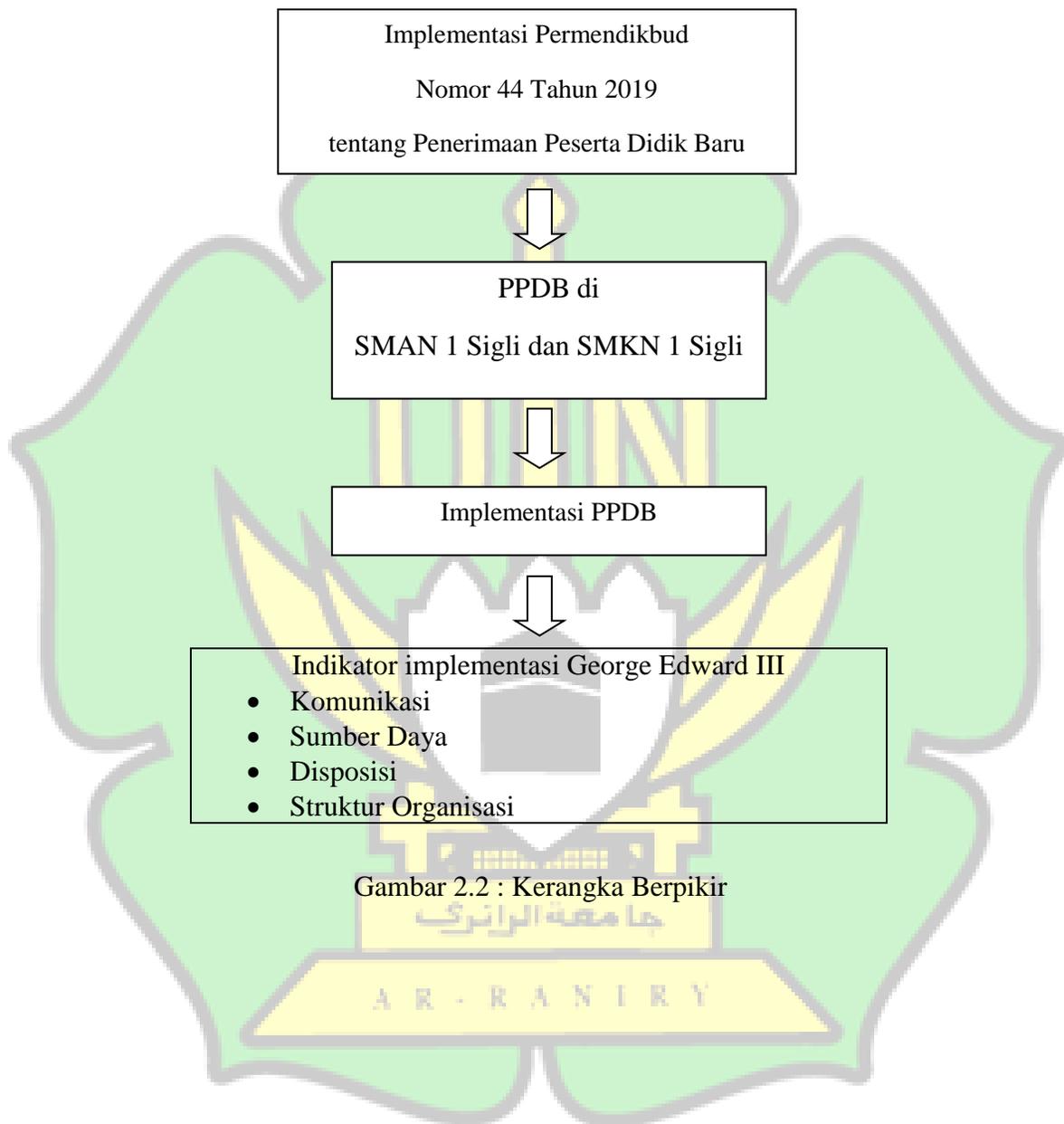
### 2.3 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III, karena metode ini merupakan metode yang sederhana namun lengkap sehingga penulis dapat melihat keberhasilan suatu implementasi. Penulis juga menggunakan teori efektivitas untuk melihat keberhasilan implementasi dari Permendikbud No 44 Tahun 2019 serta Analisis SWOT untuk mengamati kelemahan, ancaman, peluang dan kekuatan dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 sehingga dapat memberikan suatu strategi yang dapat direkomendasikan pada tiap sekolah. Dengan demikian indikator yang penulis gunakan untuk mengetahui proses implementasi dan faktor pendukung serta penghambat Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 yaitu seperti pada gambar berikut :

<sup>24</sup>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi> diakses pada 21-12-2019 14:09

## Kerangka Berpikir



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 3.1 SMAN 1 Sigli

- Alamat Sekolah

SMAN 1 Sigli merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan Km.114, Tjue, Kabupaten Pidie, Aceh.

- Visi dan Misi

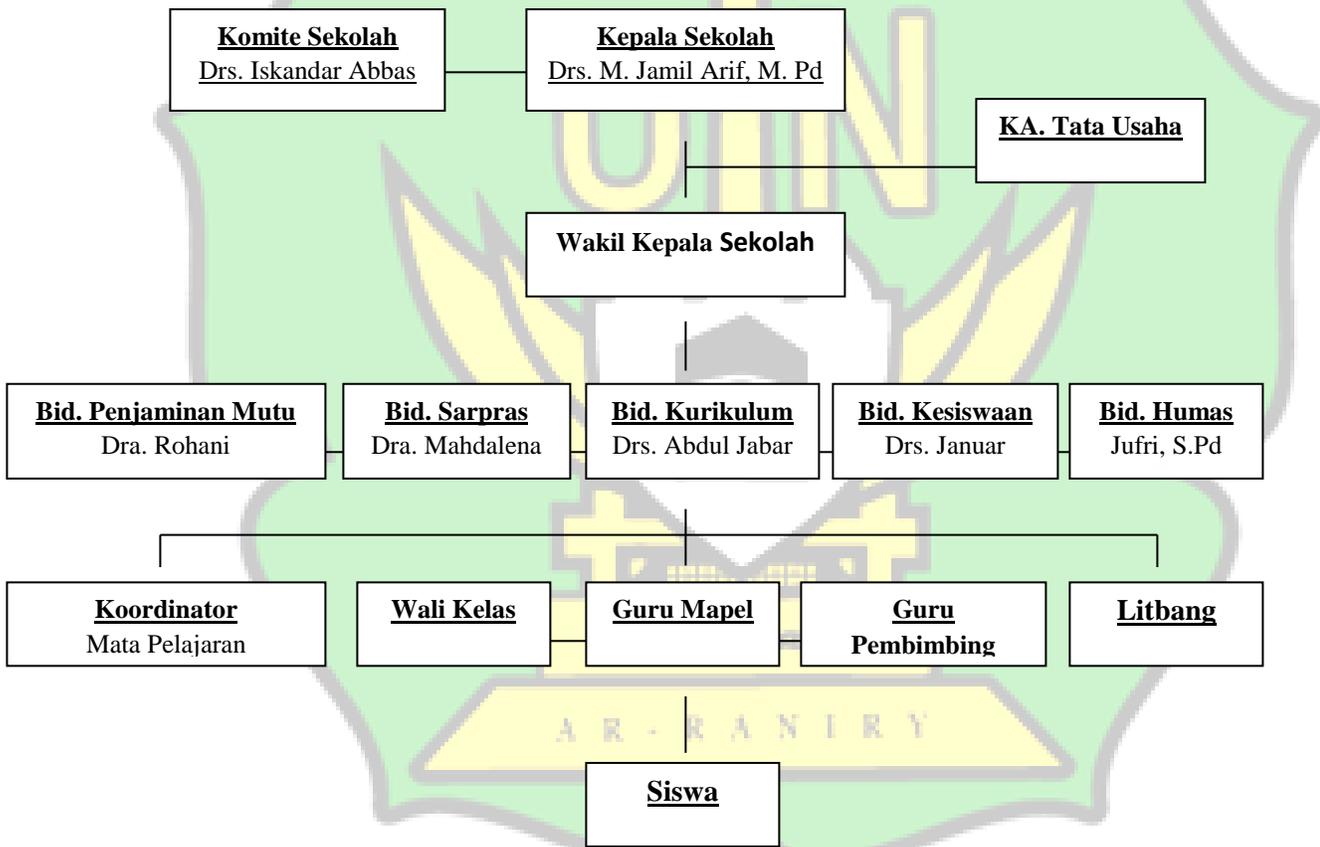
Visi : Terwujudnya SMA Negeri 1 Sigli yang cantik dengan lulusan yang cerdas, lingkungan yang asri, aman dan nyaman, warga sekolah yang taqwa, inovatif serta berwawasan kewirausahaan.

Misi :

- Memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar yang ditetapkan
- Menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja.
- Melaksanakan program peningkatan kompetensi peserta didik dibidang akademik dan non akademik yang dapat bersaing ditingkat Provinsi dan Nasional.
- Melaksanakan pendidikan karakter agar terwujud lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

- Menambahkan penghayatan terhadap budaya dan seni daerah sehingga menjadi salah satu sumber kearifan berperilaku dan bermasyarakat.
- Melaksanakan program pengembangan sekolah ramah lingkungan dan berwawasan kewirausahaan.
- Melaksanakan program kerja sama dan kemitraan dengan institusi pendidik, pemerintah, dan dunia usaha.

- Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi SMAN 1 Sigli

Sumber : SMAN 1 Sigli, 2020

- Jumlah Siswa

Tabel 3.1 Jumlah Siswa SMAN 1 Sigli

<b>Model – C</b>			
<b>Perincian</b>	<b>Banyaknya Murid</b>		
<b>Kelas</b>	<b>LK</b>	<b>PR</b>	<b>Jumlah</b>
<b>X</b>			
X.MIA.1	20	14	34
X.MIA.2	12	16	28
X.MIA.3	9	12	21
X.MIA.3	15	14	29
<b>X = 4 Rombel</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>112</b>
<b>Kelas XI</b>			
XI.MIA.1	5	26	31
XI.MIA.2	12	21	33
XI.MIA.3	13	21	34
XI.MIA.4	14	21	35
XI.MIA.5	12	23	35
XI.MIA.6	14	22	36
<b>6 Rombel</b>	<b>70</b>	<b>134</b>	<b>204</b>

XI.IIS.1	10	15	25
XI.IIS.2	11	14	25
XI.IIS.3	15	9	24
<b>3 Rombel</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>74</b>
<b>XI = 9 Rombel</b>	<b>106</b>	<b>172</b>	<b>278</b>
<b>XII</b>			
XII.MIA.1	10	21	31
XII.MIA.2	6	23	29
XII.MIA.3	9	25	34
XII.MIA.4	12	18	30
XII.MIA.5	15	17	32
XII.MIA.6	10	18	28
XII.MIA.7	11	19	30
XII.MIA.8	10	15	25
<b>8 Rombel</b>	<b>83</b>	<b>156</b>	<b>239</b>
XII.IIS.1	14	11	25
XII.IIS.2	12	11	23
XII.IIS.3	11	13	24
XII.IIS.4	11	12	23
<b>4 Rombel</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>95</b>

<b>XII = 12 Rombel</b>	<b>131</b>	<b>203</b>	<b>334</b>
<b>Total 26 Rombel</b>	<b>293</b>	<b>431</b>	<b>724</b>

*Sumber : SMAN 1 Sigli, 2020*

### 3.2 SMKN 1 Sigli

- Alamat Sekolah

SMKN 1 Sigli merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Pidie dengan alamat di Jalan Tgk Chik di Reubee, Sigli, Aceh.

- Visi dan Misi

Visi : Mengembangkan pendidikan berbasis kompetensi yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal, terampil, memiliki kualitas iman dan taqwa dibidang bisnis manajemen dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengisi lapangan kerja dalam dan lar negeri sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Misi :

- Menghasilkan tamatan yang memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keharmonisan lingkungan.
- Menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi tinggi, mampu bersaing di pasar tenaga kerja nasional dan internasional.

- Menghasilkan tamatan yang mampu memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk mengembangkan dirinya.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi bagi masyarakat.

- Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi SMKN 1 Sigli

Sumber : SMKN 1 Sigli, 2020

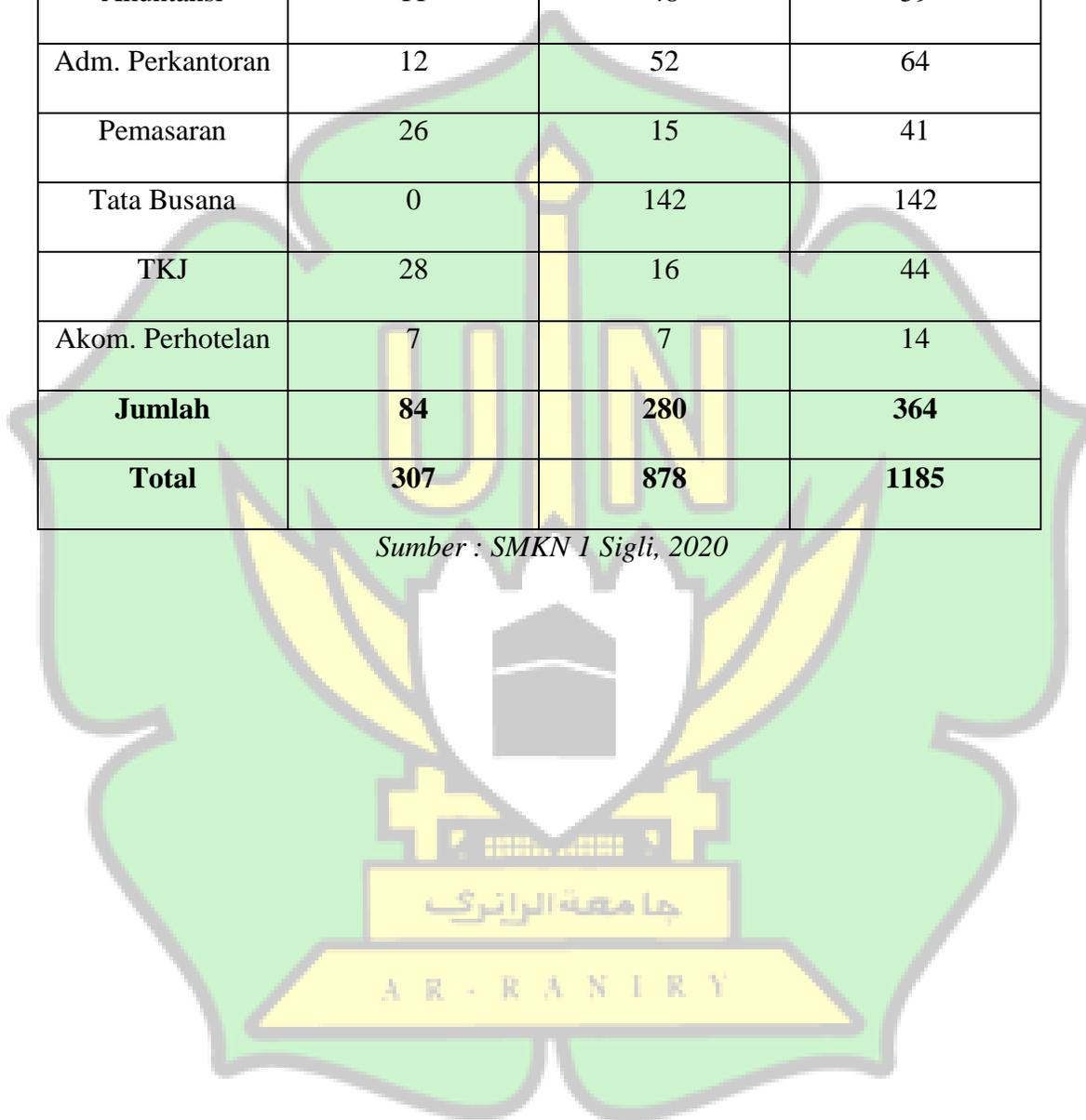
- Jumlah siswa

Tabel 3.2 Jumlah Siswa SMKN 1 Sigli

<b>Model – C</b>			
<b>Perincian</b>	<b>Banyaknya Murid</b>		
<b>Kelas</b>	<b>LK</b>	<b>PR</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Kelas 10</b>			
Akuntansi	13	43	56
Adm. Perkantoran	7	60	67
Pemasaran	38	31	69
Tata Busana	0	140	140
TKJ	46	16	62
Akom. Perhotelan	6	20	26
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>310</b>	<b>420</b>
<b>Kelas 11</b>			
Akuntansi	9	39	48
Adm. Perkantoran	19	67	86
Pemasaran	31	29	60
Tata Busana	2	134	136
TKJ	47	9	56
Akom. Perhotelan	5	10	15

<b>Jumlah</b>	<b>113</b>	<b>288</b>	<b>401</b>
<b>Kelas 12</b>			
Akuntansi	11	48	59
Adm. Perkantoran	12	52	64
Pemasaran	26	15	41
Tata Busana	0	142	142
TKJ	28	16	44
Akom. Perhotelan	7	7	14
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>280</b>	<b>364</b>
<b>Total</b>	<b>307</b>	<b>878</b>	<b>1185</b>

*Sumber : SMKN 1 Sigli, 2020*



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB

##### 4.1.1 Implementasi PPDB di SMAN 1 Sigli

Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Sigli dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie. Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten sebagai pedoman atau pegangan dalam melaksanakan sistem PPDB Tahun 2019. Implementasi dapat dilihat dari 4 elemen penting yang memuat tentang proses dari suatu kebijakan tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Apabila keempat hal tersebut dapat dicapai dengan sempurna maka pelaksanaannya dapat dikatakan Jika dilihat dari indikator yang penulis gunakan, maka implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

##### A. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang yang lain atau lebih tepatnya dari komunikator kepada komunikan. Dalam hal ini, komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari komunikator kepada komunikan atau dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi yang dimaksud dalam proses PPDB adalah penyampaian informasi kepada masyarakat. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh SMAN 1 Sigli dengan metode pesan

berantai yang disampaikan oleh pihak guru kepada masyarakat. Informasi yang didapat oleh guru disampaikan melalui pesan berantai secara manual dan juga pesan melalui media online, hal ini seperti yang disampaikan oleh waka kesiswaan SMAN 1 Sigli

*“Guru juga kemudian memberitahukan kepada masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat juga sudah membaca atau melihat di medsos perihal PPDB terbaru”.*<sup>25</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Januar selaku Waka Kesiswaan SMAN 1 Sigli dapat diketahui bahwa penyampaian informasi SMAN 1 Sigli sosialisasi tentang PPDB terbaru hanya sebatas pada wilayah sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh pak Jabar selaku guru fisika di SMAN 1 Sigli :

*“Memang benar, kita menerima informasi tentang PPD terbaru dari kepala sekolah dan selanjutnya kami sebarakan melalui pesan wa dan warga sekitar”*<sup>26</sup>

Sosialisasi tentang PPDB dilakukan oleh pihak sekolah kepada kelompok sasaran atau masyarakat melalui guru, hanya sebagian kecil masyarakat sekitar SMAN 1 Sigli saja yang mengetahui PPDB terbaru. Dengan proses sosialisasi yang disampaikan melalui pesan berantai ini, sosialisasi masih belum maksimal sehingga membuat banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang sistem zonasi dalam PPDB.

*“Apa itu jalur zonasi ? setahu saya daftar di SMAN 1 seperti biasa. Daftar, ujian seleksi baru pengumuman”*<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Januar selaku Wakil Kesiswaan SMAN 1 Sigli pada tanggal 3 Juli 2020.

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Jabar selaku guru Fisika SMAN 1 Sigli pada tanggal 3 Juli 2020.

<sup>27</sup> Wawancara dengan ibu Maya Elvira selaku Masyarakat pada tanggal 5 Juli 2020.

Begitu pemahaman yang disampaikan oleh ibu Maya Elvira sebagai warga yang berada diluar radius zonasi SMAN 1 Sigli. Di lingkungan sekolah juga tidak ditemukan flyer atau spanduk yang menjelaskan tentang PPDB jalur zonasi. Hal ini membuat proses PPDB akan berjalan dengan tidak maksimal dan tujuan dari pelaksanaan program akan terhambat.

#### B. Sumber Daya

Sumber daya dalam menentukan panitia PPDB tidak mempunyai kriteria khusus, artinya semua guru bisa menjadi panitia PPDB. Selain itu dalam penyiapan sumber daya untuk pelaksanaan PPDB tahun 2019 pihak sekolah SMAN 1 Sigli membuat pelatihan kepada guru. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang PPDB terbaru tahun 2019 dan juga mempersiapkan guru untuk membimbing siswa dengan kemampuan terbatas agar dapat menyetarakan dengan siswa lain yang mempunyai kemampuan yang diatas standar. Di SMAN 1 Sigli terdapat 60 jumlah guru/pegawai yang tersebar mulai dari kelas 10 hingga kelas 12, rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Guru SMAN 1 Sigli

NO	Keterangan	Jumlah
1	Golongan III/a	1
2	Golongan III/b	5
3	Golongan III/c	2

4	Golongan III/d	6
5	Golongan IV/a	11
6	Golongan IV/b	35
Jumlah		60

*Sumber : SMAN 1 Sigli, 2020*

Dari keseluruhan jumlah guru yang ada di SMAN 1 Sigli terdapat beberapa guru saja yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membawahi urusan PPDB ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Januar selaku kepala bidang kesiswaan :

*“sistem PPDB kita disini ada tim yang mengurus tentang PPDB yang tertumpu pada kesiswaan dan kurikulum, kemudian kita membuat rapat dengan kepala sekolah dan pengurus sekolah tentang penerimaan PPDB ini, lalu kita buat pelatihan kepada tim PPDB”.*<sup>28</sup>

Sumber daya lainnya yang penting dalam menjalankan suatu program adalah fasilitas dan juga dana yang menjadi alat pendukung implementasi suatu program. Dalam hal ini fasilitas yang dimaksud adalah ruang kelas dan segala item yang ada didalam ruang belajar megajar, karena pelaksanaan PPDB terbaru membatasi jumlah rombongan belajar pada sekolah. Selama penerapan PPDB yang menggunakan sistem zonasi, banyak ruang belajar kosong yang tidak terpakai di SMAN 1 Sigli karena adanya penurunan jumlah siswa yang masuk di awal penerimaan siswa baru, seperti yang disampaikan oleh pak januar :

<sup>28</sup>

Wawancara dengan bapak Januar selaku Wakil Kesiswaan SMAN 1 Sigli pada tanggal 3 Juli 2020.

*“itu disudut sana ada 12 lokal kosong karena kenapa ? yang dapat diterima secara sistem zonasi hanya 4 atau 5 lokal sekitaran 150 orang, yang dulunya 200 lebih hampir 300”<sup>29</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Rosniati selaku guru Ekonomi di SMAN 1 Sigli :

*“Kalau ruang belajar untuk menampung siswa memang cukup. Bahkan lebih sampai tidak terpakai sekarang selama penerapan PPDB jalur zonasi ini”<sup>30</sup>*

Dalam implementasi suatu kebijakan, anggaran merupakan suatu hal yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu program dijalankan. Dalam hal ini anggaran yang dimaksud berupa modal, kebutuhan akan modal dianggap penting karena apabila modal yang diperlukan tidak memadai maka kebijakan tidak akan berjalan efektif. Dalam pengimplementasian PPDB berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019 ini sekolah diberikan alokasi dana oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk menjalankan aturan tersebut. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Januar, beliau mengatakan :

*“saya rasa dana itu memang sudah ditetapkan sedemikian rupa, dana itu tidak berkurang ataupun lebih. Jadi ketersediaan dana tidak menjadi masalah”<sup>31</sup>*

Dengan begitu ketersediaan dana untuk implementasi PPDB pada di SMAN 1 Sigli sangat cukup untuk menunjang segala kegiatan dalam penerapan kebijakan tersebut.

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Januar selaku Wakil Kesiswaan SMAN 1 Sigli pada tanggal 3 Juli 2020

<sup>30</sup> Wawancara dengan ibu Rosniati selaku Guru Ekonomi SMAN 1 Sigli pada tanggal 3 Juli 2020

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Januar selaku Wakil Kesiswaan SMAN 1 Sigli pada tanggal 3 Juli 2020

### C. Disposisi

Disposisi adalah suatu sikap atau perilaku pelaksana kebijakan yang ditunjukkan oleh elemen dari suatu kegiatan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana komitmen, komitmen akan mengarahkan pelaksana untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan dan juga terwujudnya profesionalitas. Kemudian komitmen juga akan membuat pelaksana kebijakan selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan PPDB terbaru di SMAN 1 Sigli sikap yang ditunjukkan oleh panitia pelaksana PPDB pihak sekolah sangat berwibawa dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, sesuai dengan ujaran yang disampaikan oleh bapak Fajar yaitu salah satu calon orang tua siswa SMAN 1 Sigli :

*“sikap dari pihak sekolah sangat baik ya, kemarin ketika saya mendaftarkan anak saya ke sekolah. Saya diarahkan oleh panitia untuk mendaftar, bahkan ada calon siswa yang tidak lengkap persyaratan itu disuruh kembali untuk melengkapi persyaratan, namun secara halus”<sup>32</sup>*

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Sigli :

*“kami sangat tegas dalam melaksanakan PPDB ini, apabila ada panitia yang bertindak salah dan kedepan laporan oleh calon orang tua siswa maka akan kami tindak lanjuti”<sup>33</sup>*

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak Fajar selaku calon wali siswa di SMAN 1 Sigli pada tanggal 4 Juni 2020.

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak M Jamil Arief selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Sigli pada tanggal 2 Juli 2020.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana PPDB dalam menjalankan aturan tersebut sangat tegas dan profesional baik dalam penanganan bagi orang tua siswa baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.

#### D. Struktur Organisasi

Di SMAN 1 Sigli terdapat struktur organisasi dalam pelaksanaan PPDB yang dibawah oleh bidang kesiswaan dan bidang kurikulum. Kedua bidang tersebut terdapat dalam panitia pelaksana PPDB yang akan menjalankan segala urusan dalam penerimaan peserta didik baru mulai dari pengumuman persyaratan hingga pada tahap pendaftaran ulang calon siswa baru. Masing-masing bidang mendapatkan tugas tersendiri dalam melaksanakan PPDB, bidang kesiswaan bertugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru. Sedangkan bidang kurikulum bertugas sebagai penyesuaian pelaksanaan dengan aturan yang berlaku agar tidak ada pelaksanaan yang dilakukan diluar dari aturan yang telah ditetapkan.

*“kami disini yang bertanggung jawab atas penerimaan peserta didik baru adalah bagian kesiswaan dan kurikulum, masing-masing sudah diberikan tugas untuk selanjutnya dilaksanakan dalam penerimaan murid baru”*.<sup>34</sup>

#### 4.1.2 Implementasi PPDB di SMKN 1 Sigli

Implementasi PPDB di SMKN 1 Sigli dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun peneliti telah melakukan penelitian terhadap

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Januar selaku Wakil Kesiswaan SMAN 1 Sigli pada tanggal 2 Juni 2020.

pelaksanaan PPDB di SMKN 1 Sigli menggunakan indikator implementasi oleh George Eward III yang bertumpu pada: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Keempat hal tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dalam proses implementasi PPDB di SMKN 1 Sigli. Adapun hasil penelitian, sebagai berikut :

#### A. Komunikasi

Dalam hal komunikasi tentang PPDB di SMKN 1 Sigli melakukan sosialisasi secara menyeluruh hingga mengendalikan atau menggunakan perangkat siswa dari organisasi yang ada di sekolah untuk memberikan informasi terkait dengan penerapan PPDB. Cara yang digunakan oleh sekolah untuk memberikan informasi yang jelas yaitu melalui media sosial berupa website sekolah. Blog sekolah dan juga mailing. Tak hanya itu, sekolah juga memberdayakan siswa jurusan TKJ (Teknik Komputer Jaringan) membuat brosur sekolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui tim PPDB sekolah dan juga organisasi dibawah naungan SMKN 1 Sigli. Seperti yang dikatakan oleh pak nasir dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis :

*“sosialisasi disampaikan pertama melalui website SMK, kemudian melalui siswa sendiri dan kami ada tim pemberi informasi, malah kami ada grup yang ada link dengan osis dan pramuka, kemudian grup dengan ketua kelas. Kami sampaikan melalui pesan berantai dan kemudian disampaikan ke gampong-gampong sehingga masyarakat tahu persiapan apa yang diperlukan untuk masuk SMK”.*<sup>35</sup>

<sup>35</sup>

Wawancara dengan bapak Nasir selaku Wakil Kesiswaan SMKN 1 Sigli pada tanggal 7 Juni 2020.

Dimensi lain yang menjadi kejelasan informasi ini adalah untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengintepretasikan suatu maksud. Dimensi ini menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami sehingga kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dengan peraturan tersebut mempunyai pemahaman yang sesuai agar selaras dalam pengimplementasikan peraturan tersebut. Pihak sekolah SMKN 1 Sigli memberikan informasi yang cukup jelas terkait sebab dan akibat PPDB diberlakukan.

*“Tentu saja kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dengan maksud yang sangat baik, yaitu untuk pemerataan layanan pendidikan. Dengan harapan semua anak bisa sekolah“.*<sup>36</sup>

Kejelasan informasi yang ada cukup mengartikan bahwa informasi yang diterima oleh pihak sekolah sesuai dengan apa yang dikandung dalam peraturan yang berlaku.

#### A. Sumber Daya

Dimensi sumber daya menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan suatu program, karena sumber daya adalah penggerak utama dalam suatu program. Apabila sumber daya tidak mencukupi maka pelaksanaannya akan terhambat dan tidak bisa berjalan dengan harapan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan PPDB ada 3 sumber daya penting yang harus diperhatikan, yaitu : sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran atau dana.

<sup>36</sup>

Wawancara dengan bapak Nasir selaku Wakil Kesiswaan SMKN 1 Sigli pada tanggal 7 Juni 2020.

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting yang sangat harus dijaga kualitas dan kuantitasnya, karena poin penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan adalah pelaksana itu sendiri dan juga kemampuan pelaksana dalam memahami program tersebut. Di SMKN 1 Sigli jumlah guru/pegawai sebanyak 45 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Guru SMKN 1 Sigli

NO	Keterangan	Jumlah
2	Golongan III/b	8
3	Golongan III/c	7
4	Golongan III/d	7
5	Golongan IV/a	13
6	Golongan IV/b	10
	Jumlah	45

Sumber : SMKN 1 Sigli

Di SMKN 1 Sigli mempunyai tim yang membawahi pelaksanaan PPDB berbentuk kepanitian, seperti yang disampaikan oleh waka kesiswaan SMKN 1 Sigli, sebagai berikut :

*”di SMK yang membawahi tentang PPDB itu oleh kesiswaan dan dibuat panitia PPDB”.*<sup>37</sup>

<sup>37</sup>

Wawancara dengan bapak Nasir selaku Waka Kesiswaan SMKN 1 Sigli pada tanggal 7 Juni 2020.

Dalam hal ini SMKN 1 Sigli mempunyai kepanitian yang kompleks dalam menjalankan PPDB hingga mempunyai tim yang mengkhususkan dalam kesehatan lingkungan sekolah baik guru, siswa, dan wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya d SMKN 1 Sigli.

Fasilitas dalam pelaksanaan PPDB adalah ruang kelas yang menunjang penerimaan peserta didik baru dapat diterima. Apabila ruang kelas tidak mencukupi maka hal tersebut akan menghambat proses penerimaan pserta didik baru. Di SMKN 1 Sigli bagi kelas sepuluh tidak mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar sehingga pada awal sekolah, murid baru akan dilakukan kegiatan belajar pada siang hari, seperti yang dikatakan oleh waka kesiswaan SMKN 1 Sigli :

*“kalau fasilitas kita secara umum ahamdulillah sudah memadai, Cuma satu fasilitas khusus yang pokok itu yang belum cukup RKB khusus untuk kelas 10, mereka baru nyaman belajar disaat kakak kelasnya yang kelas 12 magang, baru ada beberapa ruang, kalau tidak sementara 2 bulan mau tidak mau harus koordinasi dengan orang tua mereka datang sore, tidak lama hanya 6 minggu. Kemudian setelah itu mereka masuk pagi kembali seperti normal”.*<sup>38</sup>

Di SMKN 1 Sigli ketersediaan dana untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sangat cukup. Karena alokasi dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

---

<sup>38</sup>

Wawancara dengan bapak Nasir selaku Wakil Kesiswaan SMKN 1 Sigli pada tanggal 7 Juni 2020.

*“soal dana tidak menjadi masalah bagi SMKN 1 Sigli, itu sudah dikondisikan oleh pihak pemerintah.”<sup>39</sup>*

## B. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah suatu hal yang dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap atau perilaku pelaksana kebijakan dapat dinilai dari bagaimana perlakuan yang diberikan oleh pelaksana kepada orang tua atau calon peserta didik baru yang mendaftar. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan ibu Ernawati yaitu salah satu calon orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya di SMKN 1 Sigli, beliau mengatakan :

*“kalau sikap dari pihak sekolah sangat baik ya, saya diarahkan oleh panitia untuk mendaftar dan dicek kelengkapan persyaratan. Bahkan dijelaskan sama mereka apa yang kita engga faham dek”<sup>40</sup>*

Dari pernyataan ibu Ernawati, dapat dikatakan bahwa panitia pelaksana PPDB SMKN 1 Sigli mempunyai sikap yang profesional dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PPDB tersebut. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak kepala sekolah SMKN 1 Sigli dalam menanggapi sikap panitia pelaksana PPDB.

## C. Struktur Organisasi

Di SMKN 1 Sigli terdapat struktur organisasi dalam pelaksanaan PPDB yang dibawah oleh bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan akan membenahi segala urusan tentang penerimaan peserta didik baru mulai dari pengumuman pesyaratan,

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak Syamsuddin selaku Kepala sekolah SMKN 1 Sigli pada tanggal 7 Juni 2020.

<sup>40</sup> Wawancara dengan ibu Ernawati selaku calon orang tua siswa SMKN 1 Sigli pada tanggal 07 Juni 2020.

pendaftaran, seleksi, pengumuman hingga pada tahap pendaftaran ulang calon siswa baru. Bidang kesiswaan kemudian membuat panitia PPDB untuk membantu dalam pelaksanaan aturan tersebut. Dalam hal lain juga dibentuknya panitia covid-19 untuk menangani calon siswa dan orang tua siswa yang akan memasuki lingkungan sekolah ketika mendaftar secara langsung, panitia covid-19 akan memastikan bahwa setiap orang yang akan mendaftar sudah benar melakukan pembersihan diri dan menggunakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. seperti yang di sampaikan oleh bapak Syamsuddin selaku kepala sekolah SMKN 1 Sigli :

*“tim khusus biasanya kami buat berupa kepanitiaan, malah kali ini kami membuat 2 tim yang pertama tim khusus tentang pelaksanaan PPDB, yang kedua tentang perlindungan warga sekolah dan masyarakat yang datang ke sekolah yang disebut dengan tim Gugus Covid SMK”<sup>41</sup>*

#### **4.1.3 Perbedaan Implementasi PPDB di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli**

Dilihat dari indikator yang penulis gunakan dalam meneliti implementasi PPDB di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli, terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan di kedua sekolah tersebut. Diantara 4 indikator yang penulis gunakan, terdapat 3 perbedaan dalam penerapannya yaitu :

##### **1. Komunikasi**

Dalam komunikasi perbedaan yang paling tampak adalah pada pelaksanaan sosialisasi tentang PPDB yang dilakukan oleh kedua pihak sekolah, dapat

<sup>41</sup> Wawancara dengan bapak Syamsuddin selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Sigli pada tanggal 7 Juni 2020.

dikatakan bahwa SMKN 1 Sigli melakukan sosialisasi secara kompleks dibandingkan dengan SMAN 1 Sigli karena SMKN 1 Sigli menggunakan banyak elemen sumber daya dalam penyebaran informasi baik melalui guru, siswa jurusan TKJ, web sekolah, dan juga organisasi sekolah yaitu pramuka. Sedangkan pelaksanaan sosialisasi tentang PPDB di SMAN 1 Sigli hanya sebatas pada guru yang mengajar pada sekolah tersebut.

## 2. Sumber Daya

Perbedaan lainnya pada penerapan PPDB di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli adalah pada sumber daya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PPDB. Salah satu perbedaan dalam sumber daya adalah fasilitas, dalam hal ini fasilitas yang dimaksud adalah ruang belajar bagi calon peserta didik baru. Di SMAN 1 Sigli ruang belajar yang tersedia sangat memadai, bahkan beberapa ruang kelas harus dikosongkan karena adanya penerapan zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Sedangkan di SMKN 1 Sigli jumlah ruang belajar masih belum cukup untuk menampung calon peserta didik baru, sehingga pihak sekolah memberlakukan sistem sekolah sore bagi calon peserta didik baru agar dapat belajar seperti biasa.

## 3. Struktur Organisasi

Perbedaan terakhir pada kedua sekolah dalam pelaksanaan PPDB adalah pada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah panitia pelaksana PPDB di kedua sekolah, di SMAN 1 Sigli Panitia pelaksana PPDB lebih kompleks dibandingkan dengan panitia pelaksana PPDB di SMKN 1 Sigli, karena

pihak SMAN 1 Sigli menggabungkan dua bidang bagian sekolah yaitu kesiswaan dan kurikulum untuk dijadikan sebagai panitia pelaksana PPDB agar pelaksanaan PPDB tidak hanya menumpuk pada satu bidang dan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan aturan. Beda halnya dengan SMKN 1 Sigli yang hanya mengandalkan bidang kesiswaan sebagai panitia PPDB.

## 4.2 Analisis SWOT

### 4.2.1 Analisis SWOT SMAN 1 Sigli

Pada penelitian ini penulis telah melakukan analisis tentang PPDB dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 menggunakan metode analisis SWOT di SMAN 1 Sigli. Analisis SWOT digunakan untuk menemukan titik kelemahan dan kekuatan yang nantinya dapat diperbaiki untuk kemajuan implementasi kebijakan, analisis SWOT juga dapat menemukan suatu strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat suatu peluang dalam kebijakan atau mempertahankan suatu program dalam pelaksanaan yang tertekan, adapun analisisnya sebagai berikut :

Tabel 4.3 Analisis SWOT SMAN 1 Sigli tentang PPDB

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah Favorit di Kabupaten Pidie</li> <li>• Sarana dan Prasarana yang sangat mencukupi</li> <li>• Jumlah Guru yang memadai</li> <li>• Struktur Organisasi yang ramping</li> <li>• Jumlah dana yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya spanduk atau papan pengumuman tentang tata cara pendaftaran PPDB</li> <li>• Belum adanya web resmi sekolah</li> <li>• Banyaknya jumlah ruang belajar yang kosong</li> </ul>

Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Sigli</li> <li>• Terbukanya diklat bagi pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penerapan zonasi</li> <li>• Berada dekat dengan beberapa sekolah yang tidak menerapkan zonasi</li> <li>• Tingginya daya saing dalam PPDB</li> </ul>

Tabel 4.4 Analisis Strategi SWOT di SMAN 1 Sigli tentang PPDB

Internal	<b>Strength (Kekuatan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah Favorit di Kabupaten Pidie</li> <li>• Sarana dan Prasarana yang sangat mencukupi</li> <li>• Jumlah Guru yang memadai</li> <li>• Jumlah dana yang memadai</li> </ul>	<b>Weakness (Kelemahan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya spanduk atau papan pengumuman tentang tata cara pendaftaran PPDB</li> <li>• Belum adanya web resmi sekolah</li> <li>• Kurangnya kompetensi pegawai</li> </ul>
Eksternal		
<b>Opportunity (Peluang)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Sigli</li> <li>• Tersedianya diklat bagi pegawai</li> </ul>	<b>SO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunakan Jumlah dana yang ada dan juga pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memenuhi animo masyarakat</li> </ul>	<b>WO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atasi masalah kompetensi dengan memberikan diklat bagi pegawai</li> <li>• Terbitkan spanduk mengenai PPDB di lingkungan sekolah</li> </ul>
<b>Threats (Ancaman)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penerapan zonasi</li> <li>• Berada dekat dengan beberapa sekolah yang tidak menerapkan zonasi</li> <li>• Tingginya daya saing dalam penerimaan peserta didik baru</li> </ul>	<b>ST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunakan dana yang cukup dengan pemanfaatan promosi sekolah</li> </ul>	<b>WT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat web sekolah untuk pemenuhan pengembangan informasi dan juga alat promosi untuk meningkatkan daya saing</li> </ul>

Dari hasil analisis SMAN 1 Sigli melalui teori SWOT maka penulis memperoleh hasil sebagai berikut :

Penyelesaian masalah dalam menghadapi ancaman dan juga peluang yang ada di eksternal lingkungan sekolah dengan menggunakan kekuatan dan juga kelemahan internal sekolah, maka penulis merekomendasikan untuk :

1. Menggunakan dana dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi keinginan masyarakat yang tinggi untuk mendaftarkan peserta didik
2. Memberikan pelatihan bagi pegawai yang kurang kompeten dalam menjalankan tugas
3. Membuat spanduk atau flyer terkait informasi penerimaan peserta didik baru tahun 2019
4. Gunakan dana yang cukup untuk pemanfaatan promosi sekolah yang lebih kreatif
5. Membuat web sekolah untuk pengembangan informasi sekolah dan juga sebagai alat promosi serta sosialisasi.

#### **4.2.2 Analisis SWOT SMKN 1 Sigli**

Hal yang sama juga penulis lakukan di SMKN 1 Sigli dengan melakukan analisis SWOT pada PPDB di SMKN 1 Sigli dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019, adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.5 Analisi SWOT di SMKN 1 Sigli tentang PPDB

<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah Favorit untuk kejuruan di Kabupaten Pidie</li> <li>• Mempunyai jurusan yang beragam</li> <li>• Ketersediaan dana yang memadai</li> </ul>	<p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana</li> <li>• Kurangnya tenaga didik pada jurusan tertentu</li> <li>• Struktur organisasi yang besar</li> <li>• Kurangnya kompetensi beberapa pegawai dalam hal teknologi</li> </ul>
<p><b>Peluang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berlakunya sistem zonasi dalam sistem PPDB pada sekolah kejuruan</li> <li>• Memiliki pasar kerja yang luas</li> <li>• Daya minat masyarakat banyak</li> </ul>	<p><b>Ancaman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju teknologi yang semakin pesat</li> <li>• Kondisi wiayah yang sempit</li> </ul>

Tabel 4.6 Analisis Strategi SWOT di SMKN 1 Sigli tentang PPDB

<b>Internal</b>	<p><b>Strength (Kekuatan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah Favorit untuk kejuruan di Kabupaten Pidie</li> <li>• Mempunyai jurusan yang beragam</li> <li>• Ketersediaan dana yang memadai</li> </ul>	<p><b>Weakness (Kelemahan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana</li> <li>• Kurangnya tenaga didik</li> <li>• Struktur organisasi yang besar</li> <li>• Kurangnya kompetensi beberapa pegawai dalam hal teknologi</li> </ul>
<b>Eksternal</b>		
<p><b>Opportunity (Peluang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berlakunya sistem zonasi dalam sistem PPDB pada sekolah kejuruan</li> <li>• Memiliki pasar kerja yang luas</li> <li>• Daya minat masyarakat banyak</li> <li>• Terbukanya diklat bagi pegawai</li> </ul>	<p><b>SO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dana yang cukup digunakan untuk mempromosikan tiap jurusan pada masyarakat dngan orientasi pasar kerja yang luas</li> <li>• Melakukan sosialisasi terhadap PPDB terbaru</li> </ul>	<p><b>WO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atasi kekurangan jumlah pegawai dengan minat masyarakat yang tinggi</li> <li>• Tingkatkan kompetensi SDM pegawai dengan memanfaatkan pelatihan balai diklat bagi pegawai</li> </ul>

<b>Threats (Ancaman)</b>	<b>ST</b>	<b>WT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju teknologi yang semakin pesat</li> <li>• Kondisi wiayah yang sempit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembaharuan teknoogi dengan mengalokasikan dana yang tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pembaharuan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan teknologi</li> </ul>

Dari hasil analisis SMKN 1 Sigli melalui teori SWOT maka penulis memperoleh hasil sebagai berikut :

Penyelesaian masalah dalam menghadapi ancaman dan juga peluang yang ada di eksternal lingkungan sekolah dengan menggunakan kekuatan dan juga kelemahan internal sekolah, maka penulis merekomendasikan untuk :

1. Jumlah dana yang cukup digunakan untuk mempromosikan tiap jurusan pada masyarakat dengan orientasi pasar kerja yang luas
2. Melakukan sosialisasi terhadap PPDB terbaru
3. Atasi kekurangan jumlah pegawai dengan minat masyarakat yang tinggi
4. Tingkatkan kompetensi SDM pegawai dengan memanfaatkan pelatihan balai diklat bagi pegawai
5. Melakukan pembaharuan teknologi dengan mengalokasikan jumah dana yang ada
6. Peningkatan dan pembaharuan pegawai dalam mengoperasikan teknologi.

### 4.3 Temuan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat temuan permasalahan yang dianggap menjadi sebuah masalah serius dalam implementasi PPDB berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019, yaitu pelaksanaan zonasi dalam jalur penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi ini menjadi sebuah masalah karena beberapa sebab :

1. Keterbatasan hak bagi orang tua dalam memilih sekolah yang berkualitas untuk anaknya
2. Sistem zonasi diuntungkan bagi beberapa wilayah yang berdekatan dengan sekolah yang mempunyai kualitas bagus
3. Pelaksanaan sistem zonasi tidak diberlakukan secara merata pada seluruh sekolah pada tingkatan yang sama.

Penerapan peraturan tersebut dikecualikan untuk SMKN 1 Sigli, karena jumlah sekolah kejuruan di kabupaten Pidie masih sedikit dan juga berjauhan satu dengan lainnya sehingga mengharuskan pemerintah untuk tidak menerapkan sistem zonasi pada sekolah kejuruan di Kabupaten Pidie, hal ini membuat keadilan dalam penerapan sistem PPDB tidak seimbang.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan juga hasil penelitian penulis selama dilapangan serta melakukan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi PPDB berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli berikut :

1. Dari hasil penelitian penulis dengan kedua pihak sekolah maka dapat disimpulkan bahwa implementasi PPDB berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli sudah baik. Dilihat dari proses implementasi yang diukur menggunakan indikator implementasi oleh George Edward III. Pada ke 4 indikator yang digunakan kedua sekolah telah memenuhi kriteria pada tiap indikator dalam pengukuran implementasi suatu program. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang pelaksanaan yang lebih baik lagi, seperti ketersediaan kelas baru bagi SMKN 1 Sigli, Pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh, dan Ruang kelas yang tidak terpakai di SMAN 1 Sigli.
2. Terdapat 3 aspek perbedaan dalam mengimplementasikan PPDB berdasarkan indikator implementasi oleh George Edward III antara SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli yaitu : komunikasi dalam cara mensosialisasikan atau menginformasikan

PPDB, Sumber daya dalam ketersediaan ruang belajar baru bagi calon peserta didik baru, dan Struktur organisasi pada kompleksitas kepanitian PPDB.

3. Adapun hal yang dianggap masih memiliki pro dan kontra dalam penerapan PPDB adalah sebagai berikut :

- a) Pemberlakuan zonasi yang tidak merata di tiap sekolah dalam jenjang pendidikan yang sama
- b) Komunikasi, belum terlaksananya sosialisasi secara efektif dan menyeluruh sehingga menyebabkan sebagian orang tua kebingungan tentang sistem baru dalam penerimaan peserta didik.
- c) Fasilitas, pengoperasian fasilitas belum maksimal. Bagi SMAN 1 Sigli ada banyak ruang kelas kosong sehingga membuat piha sekolah harus mengalokasikan dana untuk perawatan kelas yang tidak terpakai. Sedangkan untuk SMKN 1 Sigli jumlah RKB (Ruang Kelas Baru) masih belum cukup untuk menampung siswa baru, sehingga sekolah menerapkan sekolah siang bagi siswa baru.

## 5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan juga kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis menghasilkan beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan :

1. Penambahan sekolah kejuruan dalam suatu wilayah yang dianggap belum mencukupi jumlah sekolah yang tersedia.
2. Penerapan zonasi dilakukan secara merata dan berkeadilan.

3. Sosialisasi dilakukan dengan cara melibatkan elemen masyarakat dan dilakuakn secara merata agar penyampaian infromasi dapat sesuai dengan yang diinginkan. Lalu membuat sebuah pelayanan untuk menangani permasalahan PPDB.
4. Dilakukannya pengawasan untuk berjalannya PPDB berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019 dan juga pelibatan stakeholder baik masyarakat, LSM, maupun pemerintah itu sendiri.
5. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan tiap sekolah dibantu dengan pihak sekolah agar pengoperasian fasilitas disekolah dapat maksimal, sehingga tidak ada fasilitas yang kurang ataupun lebih.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Hariyoso, S. 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Peradaban. Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Gava Media. Yogyakarta.
- Iskandar, J. 2012. Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga.
- Sahya Anggara, 2014, Kebijakan Publik, Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Said Zainal, Abidin, 2006, Kebijaan Publik, Edisi Revisi Cetakan Ke-3, Jakarta : Suara Bebas.
- Solihin, Abd Wahab, 1997. Analisis Kebijakan I, Haji Mas Agung, Jakarta
- Subarsono, 2006. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
- Thoha, M. 2012. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahab, S. A. 2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

### **Jurnal/Modul :**

- DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si. 2014, Kebijakan Publik, Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama
- Haedar Akib & Antonius Tarigan Jurnal "*Artikulasi konsep implementasi kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,*
- Sri Suwitri dalam Modul "*Konsep Dasar Kebijakan Publik*"

**Skripsi :**

Apriandes Emel, *“Analaisis SWOT Guna Penyusunan Rencana Induk E-Goverment Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim”*, 2013.

Aullia Rahmawati dan Muflihatin dengan judul : *“Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri”* 2018.

Elsa Nida Pangaribuan *“Implemnetasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik baru Jenjang SMP Di Kabuoaten Gresik”* 2018.

Hermin Aprilia Lestari *“Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017”* 2017.

**Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

**Website :**

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi> diakses pada 21-12-2019 14:09

<https://www.tempo.co/abs/4460/partisipasi-pendidikan-naik-tapi-jutaan-anak-indonesia-masih-putus-sekolah> diakses pada 22-12-2019 10:05

## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)

Pertanyaan :

1. Apakah sekolah sudah menerapkan PPDB terbaru yang diatur dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 ? (Jika tidak, mengapa ?)
2. Siapakah kelompok sasaran dari peraturan tersebut ?
3. Bagaimana sosialisasi dilakukan ?
4. Apakah pelaksana mendapatkan kendala dalam melakukan sosialisasi ?
5. Apakah pelaksana menyelesaikan kendala dengan sharing bersama kelompok sasaran ?
6. Siapa saja pelaksana atau petanggung jawab dalam melakukan PPDB ?
7. Apakah bapak/ibu tahu tujuan dan sasaran kebijakan PPDB terbaru ?
8. Apakah ketersediaan dana dalam melaksanakan kegiatan PPDB tercukupi ?
9. Apakah ketersediaan fasilitas cukup untuk menunjang pelaksanaan permendikbud no 44 tahun 2019 tentang PPDB ?
10. Apakah guru mendapatkan pelatihan insentif tentang PPDB ?
11. Bagaimana implementasi kebijakan dijalankan ?
12. Bagaimana konsistensi pelaksana dalam melakukan agenda yang ditetapkan ?
13. Apakah sekolah mempunyai SOP dalam menjalankan PPDB ?
14. Bagaimana hirarki jabatan dalam pelaksanaan PPDB ?

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 370/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
  - b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 24 Januari 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
  2. Muazzinah, B.Sc., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Mukhlis Wilda Wardana
- NIM : 160802027
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Implementasi PERMENDIKBUD No. 44 Tahun 2019 tentang Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An. Rektor  
Dekan,



**Tambahan** :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diteliti dan ditakarir;
4. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921  
Homepage: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-1051 Un 08/FISIP/PP 00 9/06/2020 18 Juni 2020  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Sekolah SMAN 1 SIGLI

di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Mukhlas Wilda Wardana  
NIM : 160802027  
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Judul : Implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli di Kabupaten Pidie)

Lokasi Penelitian : - SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli Kabupaten Pidie

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

  
Ernita Dewi



PEMERINTAH ACEH  
DINAS PENDIDIKAN  
**S M A NEGERI 1 SIGLI**



Jalan Banda Aceh - Medan Km.115 Sigli  
AKREDITASI : A Email : sman1sigli57@gmail.com  
NPSN : 10100541 NIS : 300010

Kode Pos 24151  
Telp.21506  
NSS : 301060201001

Nomor : 800.2 / 707 / 2020  
Lamp : -  
Perihal : Penelitian

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor : B-1051/Un.08/UISIP/PP.00.9/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan surat dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya Nomor : 070.H.1/460/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Izin Penelitian. Dan sehubungan dengan itu kepala SMA Negeri 1 Sigli dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mukhlas Wilda Wardana  
NIM : 160802027  
Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Dengan judul : *Implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli di Kabupaten Pidie)*

Benar ianya telah selesai melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Sigli Kabupaten Pidie pada tanggal 02 Juli s.d 05 Juli 2020. Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sigli, 21 Juli 2020

Kepala SMA Negeri 1 Sigli

**Drs. M. Jamil Arif, M.Pd**

Pembina Tk.I/Nip. 19601231 198111 1 002



PEMERINTAH ACEH  
DINAS PENDIDIKAN  
SMK NEGERI 1 SIGLI



BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN

JL. TGG. CHIK DIREUBEE NO. 06, SIGLI TELP (0653) 21540 FAX. (0653) 21540

Website : [smhntsigli.sch.id](http://smhntsigli.sch.id). Email : [smh1\\_sigli@yahoo.co.id](mailto:smh1_sigli@yahoo.co.id)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800.21/497/2020

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sigli Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mukhlas Wilda Wardana  
NIM : 160802027  
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian di SMK Negeri 1 Sigli mulai tanggal 2 s/d 8 Juni 2020 dengan menggunakan Instrumen wawancara langsung dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :

*"Implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli di Kabupaten Pidie)"*

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Sigli, 21 Juni, 2020

Kepala Sekolah

SYAMSUDDIN, S. Pd, M. Pd

NIP. 19601231 198903 1 050





